



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

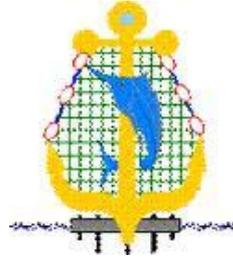


# **Rencana Strategis (RKT) REVISI/PERUBAHAN**

**2021**



**PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN  
Jl. Pelabuhan Perikanan No. 1 Cirebon 45113**



# Rencana Strategis (REVISI/PERUBAHAN)

**Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan  
Tahun 2020-2024**

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Revisi/Perubahan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan tahun 2020-2024 mempunyai nilai yang sangat strategis karena merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PPN Kejawanan dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra PPN Kejawanan Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN 2020-2024 (Perpres 18 Tahun 2020), Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020-2024, dan Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Tahun 2020-2024.

Pada Renstra PPN Kejawanan Tahun 2020-2024 penetapan Visi dan Misi dilakukan dalam rangka mendukung Visi dan Misi DJPT dan KKP untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024. Penyusunan Renstra ini merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Cirebon, 01 September 2021

Plt. Kepala Pelabuhan



Muklis

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A    Kondisi Umum .....	2
B    Potensi dan Permasalahan .....	7
C    Lingkungan Strategis .....	13
<b>BAB 2 VISI, MISI, DAN TUJUAN</b>	
A    Pembangunan Nasional .....	16
B    Pembangunan Kelautan dan Perikanan .....	18
C    Pembangunan Perikanan Tangkap .....	20
<b>BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	
A    Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional .....	26
B    Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan .....	32
C    Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Tangkap .....	38
<b>BAB 4 INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	
A    Target Kinerja .....	60
B    Kerangka Pendanaan .....	71
<b>BAB 5 PENUTUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1: Kerangka Pendanaan .....	72

# BAB 1 PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam lima tahun ke depan meliputi pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Kelima fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
  - 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
  - 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,
  - 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
  - 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
  - 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim,
  - 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
- Pembangunan perikanan tangkap 2020-2024 memiliki keterkaitan erat secara langsung dengan agenda penguatan ekonomi serta pengembangan wilayah.

Pembangunan perikanan tangkap 2020-2024 memiliki keterkaitan dengan ketujuh agenda pembangunan tersebut, khususnya agenda penguatan ekonomi serta pengembangan wilayah. Kegiatan pembangunan subsektor perikanan tangkap oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan.

Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indonesia masih sangat besar, yaitu potensi lestari sebesar 12,54 juta ton per tahun (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia), dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80% dari potensi lestari, serta pemanfaatan usaha yang baru mencapai sebesar 6,98 juta ton pada tahun 2019 (data sementara) atau baru 69,59% dari JTB. Adapun total produksi perikanan tangkap di perairan darat baru mencapai 0,55 juta ton pada tahun 2019. Berbagai upaya akselerasi pembangunan perikanan tangkap selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, pendapatan, serta tingkat konsumsi ikan, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

## A. Kondisi Umum

Capaian pembangunan Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2015-2019 didasarkan pada realisasi pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama pembangunan perikanan tangkap. Pembangunan perikanan tangkap memiliki 3 sasaran strategis utama yakni

- a) terwujudnya kesejahteraan masyarakat nelayan;
- b) terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan, serta;
- c) terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang berbasis *balance scorecard* (BSC) terhadap Rencana Kinerja (*performance plan*) yang dikaitkan dengan Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019. Sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu secara periodik, melalui serangkaian program dan kegiatan tahunan dengan mempertimbangkan kebijakan dan program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap serta beberapa pertimbangan lain, diantaranya peluang, potensi,

permasalahan dan kewenangan yang dimiliki Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. Pencapaian sasaran strategis selanjutnya direpresentasikan melalui pencapaian indikator kinerja utama serta dukungan pelaksanaan kegiatan prioritas sebagai berikut :

#### **Pertumbuhan PDB Perikanan**

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Nilai PDB perikanan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2015-2019 tercatat naik 5,47% per tahun. Pada tahun 2015, besaran Nilai PDB Perikanan (ADHK) mencapai Rp 204,02 triliun dan pada tahun 2019 menjadi Rp 252,49 triliun. Sedangkan Nilai PDB Perikanan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sejak tahun 2015 menunjukkan peningkatan struktur ekonomi sektor perikanan yang makin kuat dimana pertumbuhannya mencapai 9,8%. Hal ini dapat terlihat dari nilai ADHB Rp 288,92 triliun pada tahun 2015 naik dengan signifikan dan tumbuh hingga mencapai Rp 419,98 triliun.

#### **Nilai Tukar Nelayan (NTN)**

Realisasi NTN tahun 2015-2019 selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,75 per tahun. Nilai tukar nelayan di tahun 2015 tercatat sebesar 106,14 meningkat cukup tinggi di tahun 2019 dimana tercatat sebesar 113,74. Meningkatnya capaian NTN tersebut sangat dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima nelayan (IT) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (IB), dimana indeks harga yang diterima nelayan mengalami peningkatan sedangkan indeks harga yang dibayar nelayan mengalami penurunan.

IT tahun 2015-2019 mengalami kenaikan sebesar 4,36%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan nelayan terus meningkat yang antara lain disebabkan peningkatan rata-rata harga ikan karena terjaganya kualitas ikan hasil tangkapan. Sedangkan IB peningkatannya dibawah peningkatan IT yaitu sebesar 2,57% dimana peningkatan terbesar adalah indeks konsumsi rumah tangga sebesar 3,93%. Peningkatan NTN dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa nelayan terus mengalami surplus atau meningkat kesejahteraannya, dimana kenaikan pendapatan hasil produksi lebih besar dari kenaikan harga kebutuhannya terhadap tahun dasar (2012).

### **Pendapatan Rumah Tangga Nelayan (RTP) per Bulan**

Realisasi rata-rata pendapatan RTP tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang cukup pesat yakni meningkat sebesar 16,05 per tahun, dimana pada tahun 2015 rata-rata pendapatan RTP tercatat sebesar Rp6,46 juta/bulan menjadi Rp10,65 juta/bulan pada tahun 2019. Peningkatan rata-rata pendapatan RTP ini ditunjang dengan peningkatan rata-rata pendapatan RTP Laut yang juga meningkat cukup tinggi dari Rp8,76 juta/bulan di tahun 2015 menjadi Rp13,65 juta/bulan dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 15,37%. Sedangkan untuk rata-rata pendapatan RTP Perairan Darat meningkat dari Rp2,13 juta/bulan di tahun 2015 menjadi Rp3,57 juta/bulan di tahun 2019 dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 13,44%.

### **Pendapatan Nelayan per Bulan**

Seperti halnya rata-rata pendapatan RTP, rata-rata pendapatan nelayan juga mengalami peningkatan yang cukup besar pada periode tahun 2015-2019 dengan peningkatan sebesar 20,54% per tahun. Rata-rata pendapatan nelayan tercatat sebesar Rp 1,95 juta/bulan di tahun 2015 meningkat menjadi Rp 3,85 juta/bulan di tahun 2019. Peningkatan rata-rata pendapatan nelayan ini ditunjang dengan peningkatan rata-rata pendapatan nelayan laut dimana pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp 2,17 juta/bulan menjadi Rp 4,10 juta/bulan dengan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 19,91%. Sedangkan untuk rata-rata pendapatan nelayan perairan darat tercatat sebesar Rp 1,49 juta/bulan di tahun 2015 menjadi Rp 2,47 juta/bulan di tahun 2019 dengan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 13,34%.

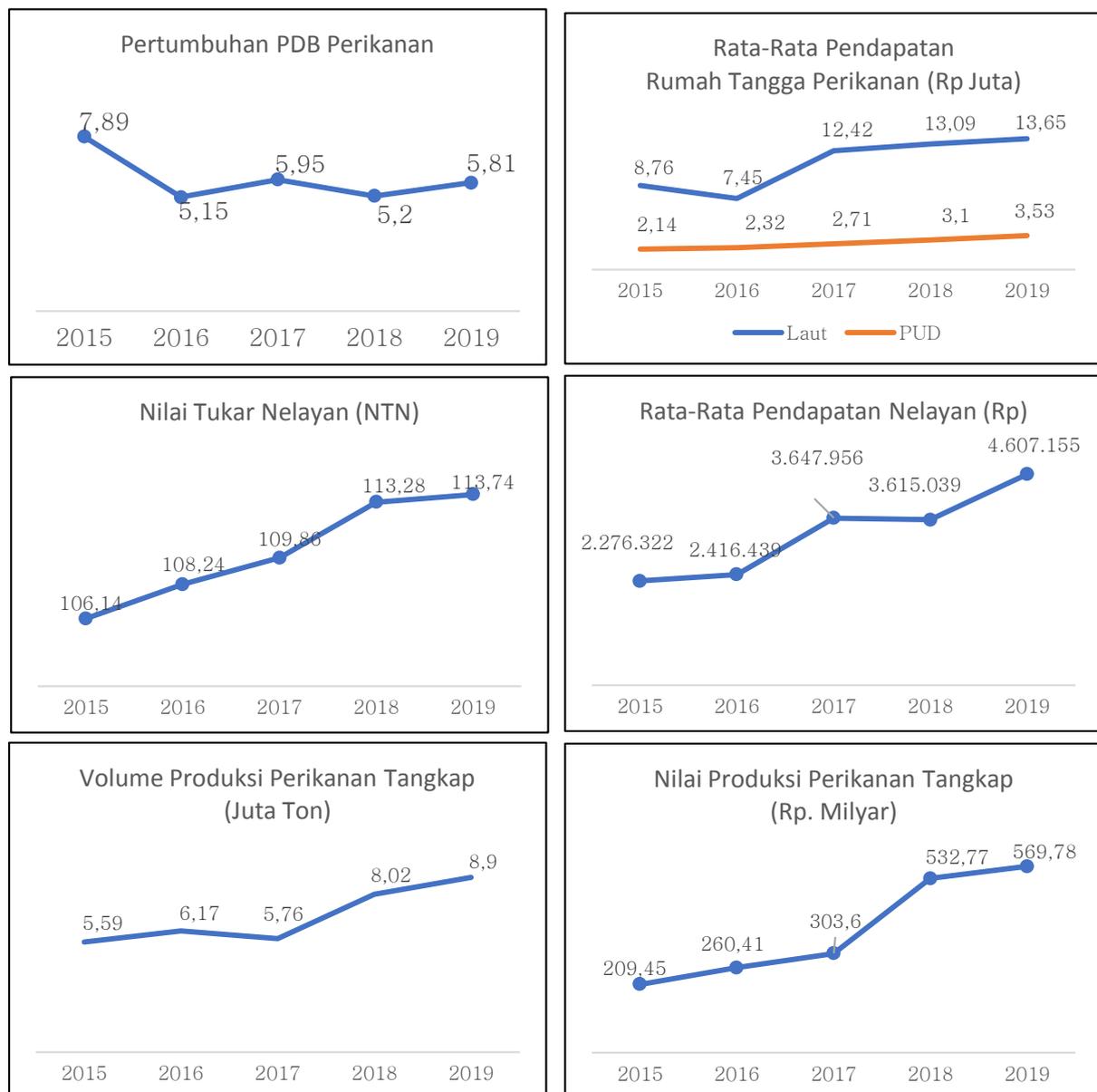
Kenaikan rata-rata pendapatan nelayan ini menunjukkan afirmasi kebijakan untuk program perikanan tangkap telah dapat meningkatkan pendapatan rata-rata nelayan pada periode tahun 2015-2019. Realisasi pendapatan nelayan berbanding lurus dengan

### **Volume Produksi Perikanan Tangkap**

Realisasi rata-rata volume produksi perikanan tangkap tahun 2015-2019 meningkat sebesar 3,11% per tahun. Volume produksi perikanan tangkap tercatat sebesar 6,67 juta ton pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 7,53 juta ton pada tahun 2019. Peningkatan volume produksi ini ditunjang dengan peningkatan volume produksi perikanan laut dimana pada tahun 2015 tercatat sebesar 6,20 juta ton dan meningkat menjadi 6,98 juta ton di tahun 2019 dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 3,05%. Sedangkan untuk volume produksi perikanan perairan darat juga meningkat dari 0,47 juta ton di tahun 2015 menjadi 0,55 juta ton di tahun 2019 dengan peningkatan rata-rata sebesar 5,87% per tahun.

Untuk Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, realisasi rata-rata volume produksi perikanan tangkap tahun 2015-2019 mengalami peningkatan 13,48% per tahun, hasil tersebut diperoleh dari penjumlahan dari volume produksi yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan

Nusantara Kejawan dengan volume produksi yang berasal dari luar Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan.



**Gambar 1.1.** Capaian Indikator Kinerja Utama Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Tahun 2015-2019

### Nilai Produksi Perikanan Tangkap

Sedikit berbeda dengan realisasi volume produksi perikanan tangkap, realisasi rata-rata nilai produksi perikanan tangkap tahun 2015-2019 meningkat sebesar 18,47% per tahun. Nilai

produksi perikanan tangkap tercatat sebesar Rp.120,57 triliun di tahun 2015 meningkat signifikan menjadi Rp.219,72 triliun pada tahun 2019. Nilai produksi perikanan tangkap di laut menyumbang sebagian besar dari capaian nilai produksi secara keseluruhan, dimana pada tahun 2015 nilai produksi perikanan tangkap di laut tercatat sebesar Rp110,05 triliun menjadi Rp202,03 di tahun 2019 dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 19,06%. Sedangkan untuk nilai produksi perikanan tangkap di perairan darat juga meningkat cukup signifikan dimana pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp10,85 triliun dan meningkat menjadi Rp17,68 triliun pada tahun 2019 dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 14,05%.

Untuk Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, 30,84% per tahun. Nilai produksi perikanan tangkap pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp. 209,45 Milyar meningkat signifikan menjadi Rp. 569,78 Milyar pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena harga ikan rata-rata mengalami peningkatan seiring dengan semakin meningkatnya kualitas mutu hasil tangkapan. Sejak tahun 2014 kapal penangkap ikan di PPN Kejawanan sudah menggunakan palka berefrigerasi sehingga ikan yang didaratkan sudah dalam kondisi beku, hal ini tentu saja dapat mempertahankan kualitas mutu ikan sampai dengan ikan didaratkan. Ikan yang didaratkan di PPN Kejawanan termasuk ikan ekonomis penting dengan harga jual yang tinggi

Capaian utama pembangunan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan ditopang oleh pelaksanaan beberapa kegiatan prioritas dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap seperti bantuan kapal perikanan, bantuan alat penangkapan ikan, bantuan premi asuransi nelayan, pengembangan kampung nelayan, fasilitasi sertifikasi hak atas tanah (SeHAT) nelayan, pengembangan pelabuhan perikanan, penempatan observer di atas kapal perikanan, serta implementasi logbook penangkapan.

Selama tahun 2015-2019, sebanyak 2.513 kapal bantuan telah dibangun dan diserahkan kepada nelayan. Kapal perikanan dengan ukuran di bawah 30 GT disalurkan dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan ukuran 30 GT ke atas. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas nelayan kecil agar dapat memanfaatkan sumber daya ikan yang berlimpah. Adapun dalam kurun waktu yang sama, DJPT juga telah menyalurkan 18.142 paket Alat Penangkapan Ikan (API) bantuan bagi nelayan.

Dalam rangka perlindungan dan peningkatan kualitas hidup nelayan, telah disalurkan bantuan premi asuransi nelayan (BPAN) kepada 1.198.177 orang nelayan. Sasaran BPAN adalah nelayan kecil dan nelayan tradisional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Sedangkan risiko yang dijamin oleh asuransi adalah kematian, cacat tetap, dan biaya pengobatan, sedangkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sejak Bulan Juli tahun 2018 telah ditetapkan bahwa Asuransi Nelayan/ABK merupakan salah satu syarat yang harus

dipenuhi dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal perikanan. Pada tahun 2018 telah disalurkan asuransi nelayan untuk 1.730 nelayan dan 119 unit kapal perikanan, sedangkan pada tahun 2019 tercatat penyaluran asuransi nelayan untuk 5.449 nelayan dan 397 unit kapal perikanan atau mengalami peningkatan sebesar 68,3% untuk jumlah nelayan/ABK dan 70% untuk jumlah kapal perikanan. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan dengan Nahkoda kapal perikanan yang didasarkan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut (PKL).

Selain itu dalam kurun waktu 2015-2019, telah dilakukan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan sebanyak 90.052 bidang, serta penataan kampung nelayan di beberapa lokasi permukiman nelayan. Untuk menjaring cakupan penataan kampung nelayan yang lebih luas, dalam beberapa tahun terakhir DJPT melibatkan peran aktif Perusahaan BUMN/swasta nasional melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)/Corporate Social Responsibility (CSR).

Pengembangan pelabuhan perikanan telah dilakukan pada 6 lokasi di tahun 2015 (PP Merauke, PP Lugu Simeuleu, PP Natuna, PP Teluk Awang, PP Untia, PP Tahuna), 9 lokasi di tahun 2017 (PPN Pengambengan, PPN Palabuhanratu, PPN Ambon, PPN Ternate, PPN Pemangkat, PPP Pondok Dadap, PP Jayanti, PP Cikidang, PP Untia), serta 1 lokasi PP Cikidang di tahun 2019. Adapun dalam kurun waktu 2015-2019, juga telah dilakukan pengembangan TPI Higienis di 31 lokasi pelabuhan perikanan di 17 provinsi.

Dalam rangka peningkatan sistem jaminan ketelusuran hasil tangkapan ikan, sekaligus memperkuat fungsi pendataan, pada tahun 2019 tercatat 347 kapal perikanan telah ditempati oleh *observer on board*. Selain itu upaya penerapan logbook penangkapan ikan terus didorong, dimana pada tahun 2019 tercatat 5.887 kapal perikanan telah menerapkan logbook penangkapan ikan. Untuk semakin mempermudah penerapannya, mulai 1 November 2018 bahkan telah diterapkan sistem *e-logbook*.

## **B. Potensi dan Permasalahan**

Pelabuhan perikanan memegang peranan yang strategis dalam pengembangan usaha perikanan maupun pengembangan masyarakat nelayan. Hal ini dimungkinkan karena pelabuhan perikanan merupakan pusat aktifitas masyarakat perikanan dimana didalamnya terdapat interaksi antar kelompok masyarakat perikanan seperti nelayan, pedagang, pengolah, maupun unsur masyarakat terkait lainnya. Dalam rangka pemanfaatan sumberdaya laut peran prasarana pelabuhan perikanan sangat strategis. Hal ini disebabkan oleh (1) pelabuhan perikanan merupakan interface antara daratan dan lautan yang menyebabkan sumberdaya

ikan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, (2) pelabuhan perikanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perikanan tangkap, dimana pelabuhan perikanan berfungsi sebagai basis usaha penangkapan (fishing base) karena segala kegiatan sebelum melakukan penangkapan ikan (penyiapan bahan perbekalan seperti es, air, dan bahan bakar) dan kegiatan pasca penangkapan (pengolahan, distribusi, dan pemasaran) berlangsung dipelabuhan perikanan.

Pelabuhan perikanan diharapkan dapat menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat nelayan sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sehubungan dengan hal tersebut, pelabuhan perikanan tidak akan berfungsi tanpa adanya keterkaitan dengan wilayah sekitar baik dari foreland sebagai pemasok hasil tangkapan maupun daerah hinterland sebagai daerah distribusi hasil tangkapan. Kegagalan operasional pelabuhan perikanan yang sering terjadi dimasa lalu diduga salah satu penyebabnya adalah kurang diperhatikannya aspek keterkaitan tersebut.

Rencana pengembangan industri perikanan disusun karena fungsi dan peranan pelabuhan perikanan yang sangat sentral dan vital dalam pembangunan perikanan dan kelautan. Pelabuhan perikanan dapat berperan sebagai pusat industri perikanan yang menghubungkan antara kegiatan usaha di laut dan di darat untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan pendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu fungsi pelabuhan perikanan sangat luas, yaitu selain mendukung kegiatan perikanan juga harus mampu mendorong kegiatan ekonomi lainnya. Keberhasilan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan serta optimalisasi dalam operasionalnya merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dari pembangunan perikanan tangkap. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, urgensi pelabuhan perikanan dalam kegiatan perikanan adalah sebagai tempat berlabuhnya kapal atau perahu perikanan; tempat melakukan kegiatan bongkar muat produksi ikan; pengembangan industri processing; pusat pemasaran dan distribusi ikan; pengembangan industri pendukung usaha perikanan, pengembangan ekonomi sekitar wilayah pelabuhan perikanan.

Dilain pihak untuk mengoptimalkan operasional pelabuhan perikanan akan sangat dipengaruhi oleh adanya kebijakan yang ditetapkan oleh instansi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sinergi dan dukungan lintas sektoral yang terkait dengan pembangunan pelabuhan perikanan diharapkan dari berbagai pihak. Sehingga perlu dibangun “corporate culture”; termasuk kemitraan pusat dan daerah dalam lingkup sektor kelautan dan perikanan serta

mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal maupun memperhatikan peran serta masyarakat.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon terletak di Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, tepatnya pada posisi 06°- 44'- 14" LS/108°- 34'- 54" BT, dilengkapi dengan berbagai sarana seperti sarana pokok, sarana fungsional dan sarana tambahan/penunjang. PPN Kejawanan Cirebon yang berada di bagian Timur Jawa Barat secara geografis sangat strategis karena merupakan pintu gerbang Jawa Barat bagian Timur dan dengan mudah menghubungkan daerah pemasaran potensial yaitu Bandung dan Jakarta.

Pembangunan PPN Kejawanan Cirebon dirintis pada tahun 1976 tetapi baru intensif pelaksanaannya mulai tahun anggaran 1994/1995. Pembangunannya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia, di mana sumber anggaran berasal dari APBN, APBD, ZEEI dan OECF. Dalam pelaksanaan pembangunannya diprioritaskan pada fasilitas pokok seperti penahan gelombang, dermaga, kolam dan alur pelayaran, rambu navigasi, jalan masuk dan jalan kompleks, TPI dan lain-lainya. Setelah melalui 3 tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1994/1995, 1995/1996 dan 1996/1997 PPN Kejawanan Cirebon pada bulan Mei 1997 dioperasionalkan dengan status Uji Coba yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak R. Nuryana, walaupun dengan fasilitas yang masih minim.

Keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ditetapkan sebagai suatu lingkungan/wilayah kerja operasional yang diharapkan akan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi (growth center) dan pengembangan ekonomi (economic developing) perikanan berbasis perikanan tangkap yang pada gilirannya akan berdampak ganda (multiplier effect) pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi secara menyeluruh.

Potensi pengembangan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada dasarnya mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai peluang yang dapat diraih untuk mengembangkan sistem perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Beberapa potensi utama antara lain sebagai berikut:

✚ **Area Pelabuhan;** Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan mempunyai luas area yang cukup luas dan masih banyak bagian yang kosong atau belum dimanfaatkan sehingga masih sangat dimungkinkan dilakukan pengembangan serta peningkatan investasi, adapun rincian area Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sebagai berikut :

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| A. Bersertifikat | : 25,40 Ha  |
| ✓ HPL No 1       | : 10,776 Ha |

- ✓ HPL No 2 : 8,226 Ha
- ✓ HPL No 113 : 1,782 Ha
- ✓ HPL No 114 : 4,335 Ha
- ✓ HPL No 115 : 0,286 Ha

B. Area Pengembangan : 48,62 Ha

**Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan;** Pemasaran ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sebagian besar dalam kondisi segar sedangkan hanya sedikit yang diolah. Pengolahan hasil perikanan di PPN Kejawanan Cirebon mayoritas di ekspor baik dalam bentuk beku ataupun kaleng dengan volume ekspor pada tahun 2015 sebesar 90,26 ton dengan nilai Rp. 940,76 Milyar dan pada tahun 2019 tercatat volume ekspor sebesar 432,67 ton dengan nilai Rp. 3.472,29 Milyar.

Negara-negara yang menjadi tujuan eksport adalah negara Uni Eropa, Cina, Vietnam dan Hongkong. Jenis hasil perikanan yang di eksport ke Uni Eropa adalah jenis komoditi Rajungan, sementara itu komoditi Kurisi, Fillet dan Udang di eksport ke negara kawasan Asia yaitu Cina, Vietnam dan Hongkong.

Selain komoditas ekspor, produksi hasil perikanan juga di pasarkan ke beberapa daerah di Jawa Barat serta Jakarta. Untuk konsumsi Kota Cirebon sendiri memiliki potensi pasar yang tinggi dengan konsumsi rata-rata 28 Kg/Kapita/Tahun.

**Fishing Ground;** Fishing Ground merupakan suatu wilayah yang akan dijadikan wilayah yang dituju untuk melakukan penangkapan ikan oleh nelayan. Fishing Ground kapal perikanan yang terdapat di PPN Kejawanan Cirebon adalah mencakup Pantai Utara Jawa Barat, Laut Jawa, Laut Natuna, Laut Flores, Selat Karimata, Selat Makasar, dan Laut Cina Selatan.

Jarak dan waktu tempuh yang diperlukan dari PPN Kejawanan ke lokasi fishing ground dengan estimasi untuk kapal mempunyai kecepatan 14 knot, 1 knot sama dengan 1,151 mil/jam dan 1 mil sama dengan 1,61 km seperti pada tabel berikut :

Tabel Jarak dan Waktu Tempuh dari PPN Kejawanan ke Fishing Ground.

No	Lokasi	Jarak (Km)	Waktu Tempuh (Jam)
1.	Laut Flores	1304	29
2.	Laut Jawa	446	10
3.	Selat Makasar	1.134	26
4.	Pantai Utara Jawa Barat	140	3
5.	Selat Karimata	563	13
6.	Laut Natuna	1.148	26
7.	Laut Cina Selatan	1.441	32

Berdasarkan tabel di atas di dapatkan bahwa jarak paling jauh dan waktu paling lama adalah ke Laut Cina Selatan dengan jarak 1.441 Km dengan waktu tempuh 37 jam, sedangkan jarak terdekat dan waktu terpendek adalah ke Fishing Ground Pantai Utara Jawa.

- ✚ **Akses Transportasi;** Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang terletak di jalur utama Pantai Utara yang menghubungkan Jakarta dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur serta menghubungkan dengan Bandung menjadikan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan mempunyai kemudahan dalam akses transportasi, selain itu adanya jalan tol yang menghubungkan ke beberapa daerah semakin melancarkan proses pemasaran. Selain itu berdasarkan Perpres Nomor 3 tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional disebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, pada Lampiran Perpres Nomor 3 tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 disebutkan bahwa salah satu daftar proyek strategis nasional adalah “Proyek Pembangunan Baru dan Pengembangan Kapasitas” yang di dalamnya menerangkan bahwa terdapat Pembangunan Pelabuhan di Provinsi Jawa Barat bagian Utara.
- ✚ **Perijinan terkait Lingkungan Hidup;** Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan telah memiliki beberapa perijinan, antara lain :
  - A. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660/12/19.1.02.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Cirebon
  - B. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Nomor 658.31/KEP.047-DLH/2019 tentang Ijin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kepada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.
- ✚ **Wisata Bahari;** Dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon tahun 2011 – 2031, Pada Pasal 52 disebutkan bahwa Pantai Kejawanan merupakan salah satu daerah pengembangan pariwisata alam. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Pemerintah Kota Cirebon memutuskan bahwa Pantai Kejawanan yang terletak di Kelurahan Pegambiran Kota Cirebon merupakan wilayah yang memiliki potensi wisata alam yang harus dikembangkan. Dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon tahun 2011 – 2031, Pada Pasal 52 disebutkan bahwa Pantai Kejawanan merupakan salah satu daerah pengembangan pariwisata alam. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Pemerintah Kota Cirebon memutuskan bahwa Pantai Kejawanan yang terletak di Kelurahan Pegambiran Kota Cirebon merupakan wilayah yang memiliki

potensi wisata alam yang harus dikembangkan. Berdasarkan hasil observasi mengenai faktor pendukung yang dimiliki Obyek Wisata Pantai Kejawan. Nama Pantai Kejawan sendiri telah dikenal sejak lama oleh mayoritas masyarakat di Kota Cirebon sebagai tujuan wisata pantai, wisata terapi terhadap penyakit kulit, lokasi yang strategis dan mudah dijangkau karena berada di jalur pantura Jawa Barat, biaya masuk di objek wisata yang terhitung murah.

Permasalahan dalam pembangunan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai ancaman yang berasal dari luar sistem perikanan tangkap di Indonesia. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) permasalahan utama, yakni sebagai berikut:

- **Operasional TPI;** Pengelolaan TPI Higienis di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Perikanan Kota Cirebon dengan memberikan ijin penyelenggaraan pelelangan ikan kepada KUD Mina Karya Bahari pada tahun 1999, akan tetapi retribusi hasil penyelenggaraan pelelangan ikan ternyata tidak disetorkan ke Kas Daerah Kota Cirebon belum operasional, sehingga PPN Kejawan dianggap tidak lagi memberikan kontribusi terhadap Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Pada tahun 2019 Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Perikanan Kota Cirebon memberitahukan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan dan pemungutan retribusi hasil pelelangan di TPI PPN Kejawan dilaksanakan oleh KSU Bina Keluarga, akan tetapi dalam pelaksanaan terdapat keberatan yang diajukan oleh pemilik kapal di PPN Kejawan terkait perhitungan besaran retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, sehingga dilakukan kesepakatan bahwa KSU Bina Keluarga tidak memungut retribusi selama masa transisi dan Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Perikanan Kota Cirebon segera melakukan sosialisasi Perwali No 40 tahun 2019 dan Perwali 59 tahun 2019.
- **Kesyahbandaran;** Kondisi eksisting dapat dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) orang Sumber Daya Manusia (SDM) Kesyahbandaran yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan yang diperbantukan di Pelabuhan Perikanan Karangsong dan beberapa Pelabuhan Perikanan lainnya yang letaknya berada di Pantai Utara Jawa Barat yang memiliki jarak yang lumayan jauh dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan sehingga diperlukan biaya operasional yang cukup tinggi;
- **Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB);** Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan telah ditetapkan sebagai salah satu Lembaga Screening Penyelenggara Bimbingan Teknis Penanganan Ikan di atas kapal oleh Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan, tetapi

masih banyak perusahaan yang berada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang belum mengajukan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (SCPIB);

- **Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI);** PPN Kejawanan memiliki SDM yang sudah dilatih sebanyak 1 (satu) orang sampai dengan saat ini pelaksanaan SHTI baru sampai dengan SHTI-LA karena perusahaan yang ada di PPN Kejawanan belum memerlukan untuk ekspor.
- **Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP);** Kekurangan petugas/operator yang sudah terlatih (minimal 2 orang lagi) serta masih ada kendala pada aplikasi diantaranya belum ada tool edit untuk data produksi dari luar pelabuhan dan ada beberapa tanggal yang menjadi anomali dimana data yang di export dari PIPP berbeda dengan data yang diinput.
- **Sertifikasi lahan;** PPN Kejawanan memiliki tanah area eksisting seluas 19 Ha dan sudah bersertipikat. Pada tahun 2019 proses pensertipikatan tanah di area pengembangan bagian barat sudah diajukan seluas 8,9 Ha, namun terdapat beberapa kendala, sampai dengan saat ini yang sudah turun sertipikat dari BPN Cirebon 3 bidang tanah dari 4 bidang tanah yang diajukan. 1 bidang tanah seluas 25.130 M2 sudah proses di BPN Pusat namun masih harus melengkapi beberapa dokumen yang disyaratkan. Terkait kendala tersebut PPN Kejawanan intensif menyampaikan laporan ke DJPT, Sekjen dan Itjen KKP, dan terus berkoordinasi dengan pihak PT HOI, KSOP Cirebon, Kemenhub, BPN Cirebon, BPN Kanwil Provinsi Jabar, BPN Pusat dan Kejaksaan Negeri Cirebon.

### C. Lingkungan Strategis

Pembangunan perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan strategis yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Dengan demikian potensi dan permasalahan yang telah teridentifikasi pada bagian sebelumnya akan dielaborasi pada konteks lingkungan strategis internal maupun eksternal, untuk selanjutnya sekaligus dianalisis berbagai alternatif dasar arah kebijakannya

Secara khusus, proses identifikasi akan ditelaah sampai pada lingkup kegiatan. Metode SWOT akan digunakan sebagai dasar analisis agar proses telaah dapat dielaborasi ke dalam lingkungan strategis, sekaligus untuk mempermudah permusan alternatif arah kebijakan.

**Tabel .** Matriks SWOT Kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

<h1>SWOT</h1>	<p><b>STRENGTH (S)</b> Faktor kekuatan internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Areal Pelabuhan luas 25,40 Ha</li> <li>2. Fasilitas Pokok, Fungsional dan Penunjang Pelabuhan memadai</li> <li>3. Lokasi strategis</li> <li>4. Penerapan ISO 9001:2008</li> <li>5. Fasilitas baru coldstorage dan sentra kuliner</li> <li>6. Kebersihan dan keamanan kawasan pelabuhan kondusif</li> </ol>	<p><b>WEAKNESS (W)</b> Faktor kelemahan internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah kapal masih sedikit</li> <li>2. Alur pelayaran dan kolam pelabuhan dangkal</li> <li>3. Produksi masih rendah</li> <li>4. Pemasaran belum optimal</li> <li>5. Kapasitas docking terbatas</li> <li>6. Wisata Bahari belum tertata dan terbangun</li> <li>7. Masterplan belum direviu sebagai dasar penyusunan dokumen AMDAL area Pengembangan</li> <li>8. Penggunaan tanah di Zona Pemukiman Nelayan oleh warga tanpa ijin</li> <li>9. Belum adanya akses jalan dan drainase, jaringan air dan listrik untuk area industri barat dan timur</li> </ol>
<p><b>OPPORTUNITIES (O)</b> Faktor peluang eksternal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses Fishing Ground</li> <li>2. Akses transportasi</li> <li>3. Akses perbankan</li> <li>4. Akses pasar</li> <li>5. Tenaga kerja</li> <li>6. Kapal berpangkalan PPN Kejawanan 770 unit</li> </ol>	<p><b>STRATEGY SO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang :</li> <li>2. Optimalisasi penggunaan tanah industri yang sudah bersertifikat 4,87 ha bagian timur dan 8,63 Ha bagian barat</li> <li>3. Pemanfaatan sentra kuliner (PP 27 tahun 2014) dan operasional Cold Storage (PP 75 tahun 2015)</li> </ol>	<p><b>STRATEGY WO</b> Strategi meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengusulkan kegiatan pengerukan dan perpanjangan breakwater 300 meter ke DJPT</li> <li>2. Penambahan operasional docking untuk kapal perikanan oleh investor</li> <li>3. Penyusunan reviu masterplan dan dokumen AMDAL area pengembangan</li> <li>4. Mengusulkan kegiatan untuk peningkatan jalan dan drainase dan kapasitas jaringan air dan listrik</li> </ol>

<p>7. Pantai Kejawanan sebagai destinasi wisata alam Kota Cirebon</p> <p>8. Satu bidang seluas 25.130 m2 sedang proses HPL di Kemen ATR/BPN</p>	<p>4. Koordinasi dengan Ditjen PRL dalam penataan dan pembangunan wisata bahari</p> <p>5. Penambahan jumlah kapal dengan memfasilitasi perizinan (rekomendasi) domisili kapal</p> <p>6. Peningkatan kebersihan dan keamanan kawasan pelabuhan</p>	<p>5. Penertiban zona pemukiman nelayan</p> <p>6. Penataan dan pembangunan wisata bahari</p> <p>7. Melanjutkan proses pensertifikatan area pengembangan</p>
---	---	---

<p><b>THREAT (T)</b> Faktor ancaman eksternal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resistensi pemilik kapal terhadap pemberlakuan Perwali 40 dan 41 tahun 2019</li> <li>2. Ketidaksiesuaian Perda Kota Cirebon No 6 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan kondisi lapangan</li> <li>3. Resistensi warga terhadap penertiban zona pemukiman nelayan</li> <li>4. Penataan bangunan liar di area wisata bahari</li> <li>5. Ketidakpastian waktu Penerbitan SK Menteri Agraria tentang pemberian hak HPL</li> </ol>	<p><b>STRATEGY ST</b> Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengusulkan DJPT berkoordinasi langsung dengan Walikota Cirebon</li> <li>2. Mengajukan Revisi Perda Kota Cirebon No 6 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha</li> <li>3. Meningkatkan pelayanan Kesyahbandaran</li> <li>4. Pemanfaatan pengelolaan sentra kuliner dan cold storage</li> </ol>	<p><b>STRATEGY WT</b> Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi izin kapal berpangkalan di PPNK</li> <li>2. Mengajukan usulan revisi PP 75/2015</li> <li>3. Mengajukan Revisi Perda Kota Cirebon No 6 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha</li> </ol>
---	---	---



# **BAB** **2** **VISI, MISI, DAN** **TUJUAN**

## **A. Pembangunan Kelautan dan Perikanan**

### **Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

### **Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden yaitu:

#### **Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**

- Peningkatan Daya Saing SDM KP
- Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan

#### **Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**

- Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

#### **Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**

- Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

#### **Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**

- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

## Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. **Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan**, yakni:
  - a. Mengembangkan kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan Perikanan
  - b. Mengembangkan inovasi dan riset kelautan dan perikanan
2. **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional**, yakni:
  - a. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap
  - b. Meningkatkan mutu, daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
3. **Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, yakni:
  - a. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati, serta
  - b. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
  - c. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
4. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP**, yakni:
  - a. Meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi KKP

## B. Pembangunan Perikanan Tangkap

### Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Visi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

### Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

#### Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Penumbuhan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap
- Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap Perempuan

## **Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**

- Peningkatan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur Perikanan Tangkap
- Melanjutkan Revitalisasi Industri Perikanan Tangkap dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0

## **Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**

- Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Sumber Daya Perikanan
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan

## **Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**

- Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap

## **Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. **Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap**, yaitu peningkatan pemahaman, kapasitas, serta inisiatif inovasi masyarakat perikanan tangkap; dilakukan melalui pendampingan/fasilitasi usaha, diversifikasi usaha, pemberdayaan/perindungan masyarakat perikanan tangkap, serta pengarusutamaan gender.
2. **Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, yaitu pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan.
3. **Mencapai Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan**, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup pada sub bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); penerapan harvest strategy, alokasi izin usaha berbasis alokasi sumber daya ikan, penggunaan sarana prasarana penangkapan ramah lingkungan, serta implementasi konsep eco-infrastructure.
4. **Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap**, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi DJPT yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

Berdasarkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap diturunkan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sebagai berikut :

1. Sebagai “Sentra Usaha Mina” artinya bahwa Wilayah PPN Kejawanan Cirebon merupakan sentral bagi kegiatan-kegiatan perikanan dari 5 (lima) TPI (Tempat Pendaratan Ikan) yang ada di Kota Cirebon sepanjang garis pantai 7 km, yang akhirnya akan menjadi Infrastruktur dari Industri Perikanan dimasa mendatang.
2. “Yang Berdaya Saing” artinya Hasil Produksi/Tangkapan PPN Kejawanan mempunyai daya mutu yang berkualitas ekspor dikarenakan sangat menjaga nilai mutu sehingga Produk Perikanan yang di pasarkan sangat mahal. Pada Tahun 2014 Indonesia sudah mencapai tingkat kesuksesan yang mencakup kawasan Pelabuhan tidak hanya sebagai Tempat Pendaratan Ikan, tetapi juga meliputi Penangkapan Ikan, Pelelangan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan. Di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan ke depannya diharapkan pula adanya industri/perusahaan yang bergerak dalam penyediaan sarana produksi perikanan yang berwawasan pengolahan sumberdaya ikan yang berkelanjutan di mana dalam pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan harus memperhatikan dampak akibat dari pemanfaatan yang berlebihan sehingga ikan tidak punah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Dengan pelayanan prima diharapkan para masyarakat /nelayan /stakeholder menerima kemudahan segala kebutuhannya yang sesuai dengan pelayanan yang disediakan di PPN Kejawanan Cirebon.
2. Pelabuhan sebagai kluster perikanan sekaligus pusat pertumbuhan industri perikanan terpadu hal ini dimaksudkan untuk memudahkan para nelayan-nelayan kecil membuka pasar ekonomi dimana akan terjadi transaksi secara menyeluruh dalam satu lokasi yaitu di alokasikan pada PPN Kejawanan Cirebon.
3. Peningkatan produksi yang diikuti dengan peningkatan mutu, hal ini dimaksudkan dengan peningkatan yang tinggi harus di usahakan nilai produksi yang tinggi pula, contohnya dengan peningkatan mutu ikan yang dihasilkan harus, sehat, segar, dan bebas formalin. Maka di Pelabuhanlah yang akan menyediakan wadah untuk meguji sample ikan yang sudah bebas dari formalin. Setelah bebas dari formalin maka ikan tersebut boleh dipasarkan.
4. Pelabuhan perikanan sebagai Pusat Informasi dan Data Statistik Perikanan, diharapkan kedepannya PPN Kejawanan Cirebon adalah wakil dari seluruh Tempat Pendaratan

Ikan/Tempat Pelelangan Ikan yang semua itu adalah wadah penghasil jumlah data dan statistik volume ikan yang di tangkap perhari, perbulan maupun pertahunnya di Kota Cirebon.

5. Menciptakan lingkungan pelabuhan perikanan yang bersih higienis, adalah tolak ukur dari mutu ikan yang akan dipasarkan didaerah tangkapan oleh karena itu baik cara ataupun tindakan pemeliharaan fasilitas-fasilitas pelabuhan yang bersih sangat diperhatikan.
6. Pelabuhan perikanan sebagai fasilitator dalam pengembangan wisata bahari, hal ini dikembangkan sebagai wadah Pendidikan bagi Pelajar untuk mengenalkan Bahwa Laut adalah salah satu kekayaan Indonesia yang indah dan tidak akan pernah habis, oleh karena itu dengan wadah Wisata Bahari diharapkan membangkitkan para generasi muda untuk lebih mencintai laut baik Flora maupun Fauna Laut yang ada di Ekosistem laut.
7. Meningkatkan multiplier effect bagi masyarakat Kota Cirebon melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, diharapkan dengan Pemusatan Kegiatan di Sektor Perikanan maka diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di kota Cirebon sendiri, sebagai contoh, Pekerja dalam bidang Pengasinan, Penyortiran, Pembersih, Pengeringan dan lain-lain. Hal ini juga diharapkan dengan penambahan tenaga kerja yang bekerja di areal PPN Kejawanan Cirebon maka akan mengurangi tingkat kejahatan dengan peningkatan taraf hidup seseorang dari menganggur menjadi pekerja.
8. Pelabuhan perikanan sebagai tempat pemantauan dan pengawasan (monitoring dan control) sumber daya ikan, tahap akhir dari semua itu diharapkan Pelabuhan Perikanan adalah media untuk mengontrol dan memonitoring baik para Nelayan/Steakholder yang ada di Kota Cirebon untuk menjaga dan mengontrol Kebutuhan Usahanya di Bidang Perikanan dalam hal Penangkapan Ikan yang Berlebih karena hal ini sudah termasuk merusak Ekosistem Laut sehingga Sumberdaya Ikan yang ada lambat laun akan habis dan tidak ada lagi, sehingga akan terjadi kepincangan/ ketidakseimbangan Ekosistem Darat dan laut.

### **Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan**

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan, antara lain :

1. Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, dengan indikator kinerja:
  - a. Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap (orang)

2. Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, dengan indikator kinerja:
  - a. Nilai PNBP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. Juta)
3. Tata Kelola Sumber Daya Ikan Bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, dengan indikator kinerja:
  - a. Jumlah Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan Yang Telah Dikumpulkan dan Diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (laporan)
4. Produksi Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, dengan indikator kinerja:
  - a. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (ton)
5. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, dengan indikator kinerja:
  - a. Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)
6. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan indikator kinerja:
  - a. Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)
7. Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, dengan indikator kinerja:
  - a. Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (orang)
8. Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, dengan indikator kinerja:
  - a. Persentase kapal perikanan yang berizin di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)
9. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, dengan indikator kinerja:
  - a. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks);
  - b. Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai);
  - c. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai);
  - d. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen);
  - e. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen);
  - f. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai);
  - g. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai).

# BAB 3

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### i. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 disusun berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Arah dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan disusun untuk menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. (DJPT)
2. Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. (DJPB)
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. (DJPDS, BKIPM)
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. (DJPRL, DJPSDKP dan BKIPM)
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. (BRSDM)

Untuk mencapai 5 arah kebijakan di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan kebijakan tatakelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Strategi pelaksanaan arah kebijakan di atas sebagai berikut:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
  - a. Optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap dengan kegiatan utama meliputi:
    - 1) Pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang ramah lingkungan;
    - 2) Penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap.
  - b. Penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi dengan kegiatan utama meliputi:
    - 1) Pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan, dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (*Major Project*) dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.
    - 2) Penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap; dan
    - 3) Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT).
  - c. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan kegiatan utama meliputi:
    - 1) Eksplorasi perikanan di ZEE dan laut lepas;
    - 2) Pengembangan lembaga pengelola WPP dan penguatan data stok sumberdaya ikan;
    - 3) Pengelolaan perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD); dan
    - 4) Partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan indonesia (RFMOs).
  - d. Reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap dengan kegiatan utama meliputi: perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait.
  - e. Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan dengan kegiatan utama meliputi:
    - 1) Fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, optimalisasi peran LPMUKP;
    - 2) Peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan, pemberdayaan kelompok nelayan perempuan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil,

- penguatan kelembagaan nelayan, dan penguatan kelompok usaha bersana melalui pembentukan korporasi nelayan (*Major Project*) berkoordinasi dengan kementerian Koperasi dan UKM dan pemerintah daerah;
- 3) Pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi tanah nelayan; dan
  - 4) Pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital.
2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Optimalisasi perikanan budidaya air payau melalui major project “Revitalisasi tambak dikawasan sentra produksi udang dan bandeng” berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha.
  - b. Pengembangan perikanan budidaya air Laut
  - c. Pengembangan perikanan budidaya air Tawar
  - d. Pengembangan budidaya ikan hias
  - e. Pengembangan budidaya rumput laut
  - f. Pengembangan pakan mandiri
  - g. Penataan perizinan usaha budidaya pusat dan daerah (Provinsi)
  - h. Pembangunan fasilitas perbenihan
  - i. Pengelolaan kluster kawasan budidaya berkelanjutan
  - j. Produksi induk unggul dan benih bermutu
  - k. Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor
  - l. Sertifikasi cara budidaya Ikan yang Baik (CBIB), cara perbenihan ikan yang baik (CPIB), dan cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB)
  - m. Sarana dan prasarana percontohan produksi serta usaha perikanan budidaya
  - n. Pembangunan infrastruktur perikanan budidaya antara lain meliputi saluran irigasi tambak dan keramba jaring apung
  - o. Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
  - p. Sertifikasi lahan dan asuransi usaha perikanan budidaya
  - q. Penguatan UPT perikanan budidaya

3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. Startegi yang akan dilaksanakan adalah:
  - a. Pemetaan dan pemantauan logistik hasil perikanan
  - b. Penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik (koridor)
  - c. Pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan
  - d. Pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan
  - e. Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan
  - f. Pemetaan logistik hasil Perikanan di daerah
  - g. Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
  - h. Keikutsertaan dalam promosi skala internasional dan investasi
  - i. Pembinaan dan Pengelolaan Pasar Ikan
  - j. Peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri (Provinsi)
  - k. Peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen
  - l. Pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor
  - m. Partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan
  - n. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil KP yang dirumuskan
  - o. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan
  - p. Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP yang dibina
  - q. Kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju zero waste
  - r. Sarana rantai dingin dan peralatan pengolahan yang disediakan
  - s. Ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah di lokasi yang dibina
  - t. Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
  - u. Fasilitasi kemudahan pelaku usaha dan investasi
  - v. uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dihasilkan
  - w. Sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan
  - x. Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
  - y. Penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan
  - z. Operasional pengawasan dan penjaminan mutu hasil produk perikanan
  - aa. Sarana dan prasarana pengujian mutu
  - bb. Penguatan UPT

4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
  - b. Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan
  - c. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/ atau dimanfaatkan
  - d. Peningkatan produksi dan usaha garam nasional
  - b. Pembangunan sarana prasarana di kawasan wisata bahari
  - c. Peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi
  - d. Peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/ terluar
  - e. Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya
  - f. Meningkatnya lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan dan/ atau rencana aksi pengelolaan
  - g. Pengelolaan Biofarmakologi
  - h. Fasilitasi perizinan pengelolaan perairan
  - i. Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut
  - j. Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan Melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut
  - k. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)
  - l. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan
  - m. Pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif
  - n. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan bidang pengawasan SDKP yang efektif
  - o. Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya
  - p. Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
  - q. Penyadaryatahuan masyarakat KP dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang tertib dan bertanggungjawab
  - r. Operasional Pengawasan ekspor, impor dan domestik
  - s. Harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri
  - t. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan karantina
  - u. Peningkatan UPT

5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
  - a. Hasil riset yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan dan sektor industri
  - b. Iptek hasil kegiatan riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP yang dimanfaatkan oleh masyarakat
  - c. SDM KP peserta diklat yang terserap di di Dunia Usaha dan Dunia Industri serta membentuk startup (usaha rintisan)
  - d. Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan
  - e. Pembentukan kelompok kelautan dan perikanan mandiri
  - f. Pelatihan masyarakat KP yang bersertifikasi kompetensi
  - g. Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
  - h. Peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP
  - i. Peningkatan UPT
  
6. Tatakelola pemerintahan yang baik. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
  - a. Indeks Profesionalisme ASN
  - b. Indek SPBE
  - c. Level maturitas SPIP
  - d. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran KKP
  - e. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP
  - f. Nilai / Predikat Sakip KKP

Implementasi hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Pengarusutamaan dalam Renstra 2020-2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatifadaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

## 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya: 1) Mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut; 2) Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan; 3) Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut; 4) Mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan; 5) Melestarikan wilayah pesisir dan laut; 6) Mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih; 7) Meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata berkelanjutan; 8) Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan; 9) Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan 10) Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menetapkan hukum internasional yang tercermin dalam the *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).

## 2. Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup: 1) Penguatan 7 prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat; 2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); 3) Penyiapan roadmap PUG; 4) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-daerah; 5) Pembuatan profil gender; dan 6) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) KKP.

## 3. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan local (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas

khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya adalah 1) Pelaksanaan pembangunan yang mengindahkan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati; 2) Pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari; dan 3) Pemberdayaan masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil.

#### 4. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*.

Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarpras, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan *one data* serta penataan sistem perizinan berbasis web (*online*), termasuk penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

### iii. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Tangkap

#### Pendekatan Konseptual

Pembangunan sebuah sub sektor harus mulai dikembangkan ke dalam proses yang lebih dinamis; mempertimbangkan isu terkini serta berupaya mengantisipasi tantangan di masa mendatang untuk mencapai sebuah tujuan pembangunan. Selain itu dalam kerangka sistem perencanaan nasional, pembangunan sebuah sub sektor juga sudah seharusnya memiliki referensi yang erat dengan pembangunan pada skala yang lebih luas yakni sektoral maupun nasional.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan tangkap terutama dilaksanakan untuk mendukung pembangunan nasional pada agenda 1 “**memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan**” dan agenda 2 “**mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan & menjamin pemerataan**”. Agenda penguatan ketahanan ekonomi akan diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan, serta akselerasi peningkatan nilai tambah. Adapun agenda pengembangan wilayah

akan diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan bukti data, informasi dan pengetahuan yang baik, akurat dan lengkap.

Bisnis proses perikanan tangkap merupakan sebuah sistem yang menjelaskan bagaimana usaha perikanan tangkap berjalan, mulai dari penjabaran kegiatan input, interaksi antar kegiatan, sampai pada alur pencapaian output dari pembangunan sub-sektor perikanan tangkap. Bisnis proses juga biasanya mengidentifikasi keterlibatan *stakeholder* serta menjelaskan hubungan keterkaitannya. Dengan demikian hal tersebut menegaskan kembali bahwa dalam konteks perencanaan strategis pembangunan perikanan tangkap, penyertaan kerangka bisnis proses sebagai dasar menjadi bersifat mutlak.

Mengacu pada perkembangan terkini konsep pengelolaan perikanan, manajemen perikanan tangkap akan diperspektifkan ke dalam 3 aspek utama yakni: 1) Manajemen nelayan; 2) Manajemen sumber daya ikan; serta utilisasi keduanya melalui 3) Manajemen usaha penangkapan ikan, yang dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Manajemen Nelayan**

Manajemen nelayan terdiri dari 2 komponen utama pembentuk yakni dukungan terhadap usaha perikanan nelayan serta dukungan terhadap *social security* nelayan. Dukungan usaha perikanan bertujuan untuk mengakselerasi usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan, seperti misalnya perbaikan mindset, peningkatan kapasitas terhadap penggunaan teknologi, serta fasilitasi akses pendanaan.

Adapun dukungan terhadap *social security* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga nelayan, melalui diversifikasi usaha serta fasilitasi penyaluran jaminan kesehatan, pendidikan, maupun perbaikan lingkungan permukiman nelayan. Manajemen nelayan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan kenelayanan.

### **2. Manajemen Sumber Daya Ikan**

Manajemen sumber daya ikan terdiri dari 2 komponen utama pembentuk yakni pengaturan alokasi (sumber daya ikan dan izin) serta pemantauan pelaksanaan perizinan. Pengaturan alokasi mencakup instrumen pengalokasian SDI dan izin oleh pemerintah pusat serta proses pemberian izin baik oleh pemerintah pusat, daerah, maupun upaya integrasi izin pusat-daerah.

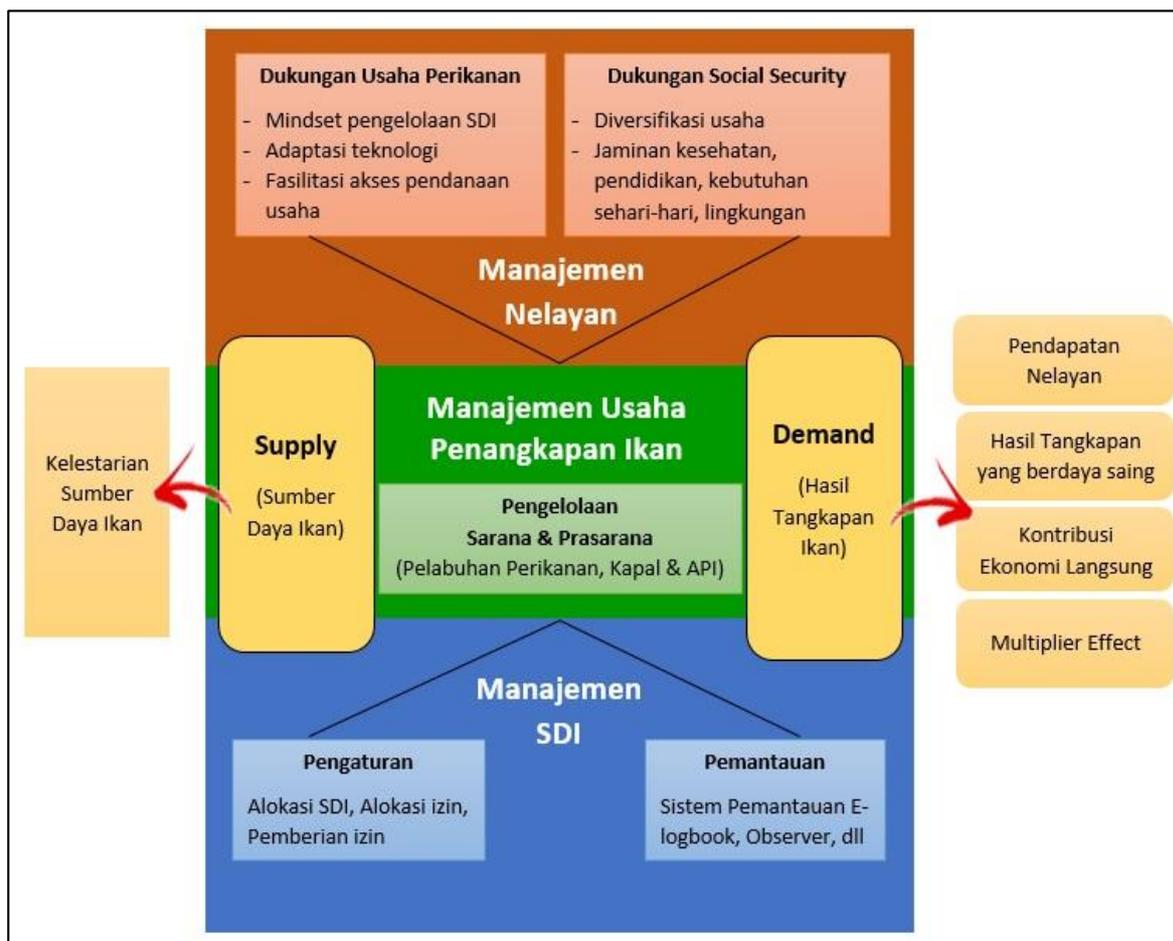
Adapun pemantauan pelaksanaan perizinan dilakukan melalui instrumen penerapan e-logbook, penempatan observer, serta peningkatan kepatuhan pada laporan LKU-LKP. Optimalisasi manajemen sumber daya ikan, utamanya akan dapat tercapai seiring konsep pengelolaan berbasis WPP diterapkan secara penuh. Manajemen sumber daya ikan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan pengelolaan sumber daya ikan dan kegiatan pengelolaan perizinan.

### 3. Manajemen Usaha Penangkapan Ikan

Manajemen usaha penangkapan ikan berisi segala mekanisme terkait pengaturan pemanfaatan sumber daya ikan oleh nelayan, sehingga sifatnya merepresentasikan irisan antara manajemen sumber daya ikan dan manajemen nelayan. Selain itu, manajemen usaha penangkapan ikan juga dapat dianggap sebagai ujung tombak sinergi antara penyediaan supply (sumber daya ikan) dan pemenuhan demand (hasil tangkapan ikan).

Mengacu pada peran strategis tersebut, manajemen usaha penangkapan ikan sebenarnya menjadi tahapan yang paling penting dalam mencapai berbagai outcome pembangunan perikanan tangkap, yakni meliputi peningkatan kelestarian sumber daya ikan, pendapatan nelayan, daya saing hasil tangkapan, kontribusi ekonomi langsung, serta *multiplier effect* lainnya. Manajemen sumber daya ikan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan, dan kegiatan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan.

Semakin tingginya faktor permintaan terhadap produk perikanan serta adanya potensi keterbatasan dukungan ekosistem perikanan, seringkali semakin mendorong ketidakseimbangan terhadap usaha penangkapan ikan yang ideal. Pembelajaran pada periode pembangunan sebelumnya tahun 2015-2019 semakin memperlihatkan bahwa tren pengelolaan perikanan tangkap di masa mendatang akan semakin mengerucut pada permasalahan *supply* dan *demand*. Untuk memenuhi keseimbangan *supply-demand* tersebut, hubungan 3 aspek utama dalam konsep manajemen perikanan harus berjalan secara seimbang, yakni antara aspek sosial, ekonomi serta aspek lingkungan ataupun seringkali direpresentasikan melalui hubungan antara *stakeholder* nelayan, pengusaha, dengan pemerintah (**Gambar 3.1**). Penggunaan pendekatan *supply-demand* juga dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan utama industrialisasi sektor kelautan dan perikanan yang telah dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.



Gambar 3.3. Implementasi Pendekatan Supply-Demand terhadap Manajemen Perikanan Tangkap

### Arah Kebijakan dan Strategi

Secara khusus, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan pada pembangunan sub sektor perikanan tangkap diarahkan untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, serta peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan penterjemahan arah kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke dalam 2 arah kebijakan yakni 1) Kebijakan Pokok dan 2) Kebijakan Pengarusutamaan, termasuk berbagai indikasi strategi pelaksanaan, serta penetapan kegiatan prioritas di dalamnya.



**Gambar 3.4.** Pendekatan Perencanaan Strategis Sub Sektor Perikanan Tangkap, Arah Kebijakan Utama, Serta Kegiatan Prioritas Tahun 2020-2024

## 1. Kebijakan Pokok

- a. **Membuka komunikasi dengan stakeholder untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual**

Kebijakan ini dilakukan melalui pendekatan: 1) Kajian atas regulasi dalam rangka percepatan investasi sub bidang perikanan tangkap; 2) Konsultasi publik dengan stakeholder untuk perumusan kebijakan; 3) Pendekatan ilmiah/akademik berbasis data dan pengetahuan faktual dalam perumusan kebijakan; 4) Koordinasi dengan Kementerian Koordinator dan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk penetapan kebijakan perikanan tangkap; 5) Kunjungan kerja dan diskusi stakeholders di pelabuhan perikanan dan sentra nelayan. Arah kebijakan ini dilakukan dengan basis pendekatan data faktual, keterbukaan informasi secara bertanggungjawab berbasis website dan transparansi, dan berbasis riset dan pengetahuan faktual.

- b. **Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap yang berkelanjutan.**

Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

## 1) Optimalisasi Produktivitas Sarana Prasarana Perikanan Tangkap

Utamanya akan dilakukan melalui utilisasi armada perikanan tangkap sebagai sarana prasarana utama produksi. Operasional kapal perikanan, selektivitas penggunaan alat penangkapan ikan, serta kapasitas awak kapal perikanan dapat dianggap sebagai ujung tombak dalam upaya menciptakan pengelolaan perikanan yang seimbang. Dalam hal ini artinya diharapkan perangkat armada perikanan tangkap tersebut, bukan hanya mampu menghasilkan volume produksi yang tinggi, namun juga produk perikanan yang lebih berdaya saing, serta sekaligus dapat menjaga stabilitas ekosistem perikanan dan daya dukung lingkungan.

Tingginya peluang pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia, serta rencana akselerasi di ZEEI dan laut lepas perlu direspon melalui konsep industrialisasi sarana-prasarana penangkapan ikan, yakni meliputi: peningkatan efiseinsi-kemampuan jangkauan operasional, kualitas hasil tangkapan, serta jaminan ketenagakerjaan. Sistem manajemen armada pun (pendaftaran, penandaan, persetujuan dan evaluasi operasional) perlu diperkuat pada lingkup nasional untuk dapat mewujudkan konsep industrialisasi yang berkelanjutan.

Restrukturisasi armada perikanan harus menciptakan kinerja yang lebih efisien melalui adopsi teknologi ramah lingkungan yang telah teradaptasi kearifan lokal. Pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan pun perlu ditingkatkan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman maupun kapasitas nelayan dalam pemanfaatannya.

Dalam upaya mewujudkan optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Restrukturisasi dan modernisasi kapal perikanan, alat penangkapan ikan, mesin dan alat penangkapan ikan;
- b) Peningkatan produktivitas penggunaan alat penangkapan ika dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- c) Peningkatan standardisasi kapal perikanan yang memenuhi aspek laik tangkap dan laik simpan, termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
- d) Peningkatan standar rancang bangun, keselamatan dan keamanan kerja di kapal perikanan;
- e) Peningkatan nilai ekonomi ikan hasil tangkapan melalui peningkatan kualitas penanganan ikan di atas kapal perikanan (CPIB);
- f) Manajemen tata kelola (pendaftaran, penandaan, persetujuan pembangunan kapal dan pemantauan operasional) kapal perikanan nasional secara elektronik dan terintegrasi;

- g) Optimalisasi dan mekanisasi penangkapan ikan dengan penerapan rekayasa teknologi penangkapan pada alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan armada perikanan tangkap; dan
- h) Perlindungan dan peningkatan kapasitas awak kapal perikanan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bidang perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan awak kapal perikanan.

<b>Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan</b>
1. Pengembangan industri perkapalan nasional, untuk mendukung pergerakan industri perikanan nasional;
2. Intensifikasi tata kelola kapal perikanan nasional, khususnya pada kapal izin daerah dan kapal perikanan swasta;
3. Peningkatan keterlibatan pada tata kelola awak kapal perikanan;
4. Peningkatan manajemen data armada perikanan nasional.

## 2) Penyediaan Infrastruktur Perikanan Tangkap yang Terintegrasi

Implementasi pengembangan infrastruktur berdasarkan bisnis proses usaha perikanan tangkap menjadi kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi; dengan mengedepankan outcome berupa efisiensi pengelolaan dan nilai tambah hasil tangkapan ikan. Sinergi pengembangan infrastruktur diarahkan bukan hanya bersifat antar sektor, melainkan juga antar wilayah, serta diperkuat dengan peningkatan konektivitas melalui intensifikasi teknologi informasi dengan basis data yang lebih akurat. Secara umum arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong sistem infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bermutu dan berdaya saing; termasuk integrasinya dengan sektor terkait, seperti industri, jasa, dan perhubungan/transportasi.

Pengelolaan berbasis WPP pun mendorong secara spesifik peran infrastruktur perikanan tangkap, utamanya pelabuhan perikanan untuk semakin diarahkan sebagai sentra lokasi dari setiap kegiatan perikanan tangkap di setiap WPP, serta untuk semakin mewujudkan konektivitas logistik ikan baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Artinya pelabuhan perikanan mulai memiliki tanggung jawab kewilayahan dalam menjalankan fungsinya. Untuk mendukung hal tersebut, melalui kegiatan prioritas “Pelabuhan Perikanan Unggul”, fasilitas pelabuhan perikanan akan terus dikembangkan pada tahap lebih lanjut, serta ditingkatkan perannya.

Dalam upaya penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan mutu ikan dan penerapan standarisasi ramah lingkungan melalui *Eco Fishing Port*, termasuk didalamnya penguatan instrumen SHTI;
- b) Penguatan SDM dan fungsi kesyahbandaran; intensifikasi pelibatan pemerintah daerah;
- c) Standarisasi ketersediaan-kualitas fisik sarana prasarana, operasional, fungsi pelayanan (ISO-9001), serta penetapan aspek hukum di wilayah kerja pelabuhan perikanan (WKOPP);
- d) Peningkatan sinergi bisnis perikanan terutama dengan sistem pengolahan dan pemasaran, termasuk melalui integrasinya dengan pasar ikan bertaraf internasional;
- e) Peningkatan keterpaduan pelabuhan perikanan UPT pusat dan UPTD dalam mengimplementasikan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan (RIPPN); baik dari aktivitas, data dan informasi, serta peningkatan konektivitasnya melalui sistem IT, termasuk melalui pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah maupun alternatif peningkatan kelembagaannya;
- f) Penguatan manajemen risiko fasilitas, termasuk terhadap faktor alam (pendangkalan, bencana alam); dan
- g) Peningkatan fungsi operasional SKPT Merauke, SKPT Natuna, SKPT Sebatik, dan SKPT Saumlaki.

<b>Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alternatif pembiayaan dalam pembangunan fisik infrastruktur pelabuhan perikanan;</li> <li>2. Sinergitas beberapa regulasi sebagai landasan pengembangan PP; terkait a) Pemerintahan Daerah, khususnya pada proses pengalihan P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen) PP dan b) RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil);</li> <li>3. Optimalisasi peningkatan peran PP sebagai sentra ekonomi dan pusat aktivitas nelayan; utamanya untuk memudahkan fungsi kontrol pemerintah;</li> <li>4. Intensifikasi tata kelola pengembangan PP secara nasional, baik yang melalui penganggaran APBN KKP, DAK, APBD maupun swasta.</li> </ol>

### 3) Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)

Inisiasi pengelolaan perikanan berbasis WPP telah dilakukan sejak satu dekade terakhir, namun operasionalisasinya belum optimal. Padahal sampai dengan saat ini instrumen kelengkapannya tergolong telah siap, mulai dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), Lembaga Pengelola Perikanan (LPP), infrastruktur

dasar, maupun mekanisme pengaturan lainnya. Pengelolaan berbasis WPP diarahkan untuk berperan sebagai management authority yang mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola WPP, khususnya dalam pelaksanaan dan evaluasi RPP. Termasuk didalamnya menyelesaikan isu-isu pengelolaan perikanan, serta sebagai wadah koordinasi dan sinergi dari pengelolaan perikanan di masing-masing WPP.

Upaya pemanfaatan sumber produksi akan terus didorong dari lokus-lokus potensial yang selama ini belum optimal intervensinya, seperti pada wilayah perairan umum daratan; mempertimbangkan tidak sedikit daerah yang secara geografis memiliki banyak wilayah perairan umum daratan seperti sungai dan danau. Selain itu semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global sekaligus pertimbangan terhadap kedaulatan NKRI, pemanfaatan usaha penangkapan ikan di ZEEI dan laut lepas juga akan lebih diakselerasi, khususnya pada komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, tongkol. Di sisi lainnya peningkatan sistem jaminan ketelusuran terus didorong melalui perluasan cakupan penerapan e-logbook serta penempatan observer on board pada kapal perikanan.

Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan operasionalisasi lembaga WPP dalam pengawasan, pengalokasian SDI, sinergi pembangunan pusat-daerah dan antar-daerah, serta penyelesaian isu kewilayahan termasuk nelayan andon;
- b) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui kepatuhan pelaksanaan e-logbook secara nasional untuk kapal > 5 GT, serta perluasan cakupan observer di atas kapal perikanan;
- c) Penguatan basis pengalokasian sumber daya ikan, sebagai dasar optimalisasi pemanfaatan;
- d) Peningkatan produktivitas perairan umum daratan, melalui perluasan cakupan pendataan serta pengembangan LP3D (Lembaga Pengelolaan Perikanan Perairan Darat);
- e) Peningkatan produktivitas ZEEI dan laut lepas, khususnya melalui pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol; serta mendorong kerjasama bilateral, regional dan internasional, khususnya pada forum RFMO; dan
- f) Mendorong sertifikasi dan sistem ketertelusuran (*traceability*) hasil tangkapan ikan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan basis data pengalokasian SDI; intensifikasi koordinasi dengan otoritas penyusun stok SDI dan akademisi (<i>backward linkage</i>);</li> <li>2. Penguatan fungsi manajemen pemanfaatan SDI melalui pengendalian perairan overfishing dan optimalisasi perairan underfishing; Intensifikasi koordinasi dengan unit kerja pemanfaatan usaha (<i>forward linkage</i>), seperti dalam alokasi izin, kapal, dan pengembangan PP;</li> <li>3. Intensifikasi koordinasi dengan Pemda terkait operasionalisasi WPP, penyelesaian andon, pemanfaatan perairan umum daratan.</li> </ol>

#### 4) Reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap

Upaya pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fisheries* (IUUF) sejauh ini telah terbukti mampu berkontribusi pada pemulihan stok sumber daya. Melanjutkan momentum baik tersebut, perizinan didorong untuk menjadi instrumen pengakselerasi usaha (dengan otoritas pemerintah terus melakukan penyederhanaan sistem) yang bertanggungjawab (dengan pelaku usaha semakin tertib aturan).

Dalam rangka mendukung pengelolaan berbasis WPP, alokasi dan evaluasi izin dari otoritas nasional harus menjadi acuan dasar untuk diaplikasikan secara ketat, termasuk di tingkat daerah. Sebagai langkah awal, upaya integrasi perizinan perlu diintensifkan, yakni antar K/L (KKP dan Kemenhub) maupun antara pusat-daerah (KKP dan Pemda). Dengan cakupan pengaturan yang luas dan bersifat antar kewenangan tersebut, pemutakhiran penggunaan *e-service* dan *platform* yang terintegrasi perlu terus didorong untuk membangun sistem perizinan yang real-time, transparan, dan terukur.

Dalam upaya mengimplementasikan reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan dan penyebarluasan SILAT;
- b) Sinergi mekanisme perizinan usaha penangkapan ikan dengan Kemenhub, termasuk upaya integrasi maupun intensifikasi pelaksanaan gerai di daerah;
- c) Sinergi sistem perizinan pusat dan daerah yang lebih tertata;
- d) Pemutakhiran dan peningkatan inovasi pelaksanaan *e-services*;

- e) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan usaha perikanan tangkap; dan
- f) Implementasi perizinan berdasarkan alokasi usaha penangkapan ikan.

<b>Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan</b>
1. Sinergitas regulasi terkait Pemerintahan Daerah; kewenangan perizinan dan penerbitan BPKP oleh pemerintah daerah
2. Sinergitas peraturan daerah (Perda) terkait sistem perizinan, dalam upaya mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah
3. Inovasi teknologi dalam pelaporan usaha untuk meningkatkan kualitas data pemanfaatan SDI dan potensi pendapatan negara

### 5) Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan

Mengacu pada pembelajaran sebelumnya bahwa program bantuan sebenarnya secara akumulatif dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan nelayan, namun dengan beberapa catatan seperti perlunya pelibatan aktif pemerintah daerah maupun nelayan itu sendiri. Dengan demikian kedepannya program serupa perlu didorong agar lebih memperhatikan perspektif stakeholder utama nelayan serta memposisikan DJPT bukan hanya sebagai pelaksana lapangan, melainkan juga koordinator dari sistem perlindungan nelayan yang lebih luas.

Pada dasarnya pemenuhan *social security* masih menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat miskin, termasuk nelayan. Kebutuhan biaya hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan keluarga, serta perbaikan lingkungan, mendorong nelayan untuk memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dari hasil penangkapan ikan. Sehingga secara psikologis, nelayan akan sangat sensitif terhadap segala perubahan sistem yang dapat mempengaruhi tingkat penghasilannya. Pemenuhan kebutuhan dasar dimaksudkan juga agar nelayan lebih resisten terhadap ketidakpastian usaha penangkapan ikan, sekaligus untuk membentuk jaring pengaman sosial yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi *force majeure* seperti bencana alam.

Dalam hal ini peran DJPT perlu dipertegas yakni untuk memfasilitasi peningkatan usaha nelayan serta sebagai koordinator/penyedia data kenelayanan yang akurat untuk memfasilitasi bantuan antar sektor. Peran nelayan maupun pemerintah daerah pun perlu disinergikan untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan nelayan secara tepat maupun mencegah timbulnya perbedaan persepsi antara nelayan dan pemerintah.

Dalam upaya pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan kualitas hidup nelayan melalui pengembangan kampung nelayan maju;
- b) Perlindungan dan bantuan nelayan melalui bantuan premi asuransi nelayan, termasuk perluasan skema asuransi mandiri, bantuan sarana penangkapan ikan, dll;
- c) Pemberdayaan kapasitas nelayan terhadap risiko mata pencaharian melalui diversifikasi usaha, peningkatan kewirausahaan serta literasi manajemen keuangan;
- d) Peningkatan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dari aspek permukiman (KemenPUPR), kesehatan (Kemenkes), Pendidikan (Kemendikbud), lingkungan (KemenLHK), dll;
- e) Penguatan kapasitas kelembagaan usaha nelayan; inovasi akses permodalan dan intensifikasinya termasuk melalui akses LPMUKP dan sertipikasi hak atas tanah nelayan, serta inisiasi pengembangan korporasi nelayan; dan
- f) Penguatan informasi kenelayanan melalui intensifikasi pelibatan daerah dan komunikasi dengan nelayan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Penguatan database kenelayanan untuk menjaring kerjasama pemberdayaan-perlindungan nelayan dengan lintas sektor, pemda, swasta;
2. Penguatan jalur & mekanisme komunikasi dengan nelayan untuk pemetaan kebutuhan nelayan secara tepat dan responsif;
3. Mengarusutamakan nelayan sebagai subjek pemberdayaan, melalui perubahan mindset dan kapasitas nelayan untuk mandiri; bukan lagi hanya sebagai objek.

**c. Reformasi Birokrasi DJPT menuju birokrasi yang lebih berkualitas**

Reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka implementasi RB DJPT berdasarkan prioritas dan kepentingan nasional yang dilakukan melalui 5 pendekatan, yaitu: 1) *Human Capital*; 2) *Organisation Capital (Right Sizing Organisation)*; 3) *Finacial and Planning Capital*; 4) *Information Capital*, serta 5) *Control Capital*.

Di masa mendatang, tantangan sub-sektor perikanan tangkap diprediksi akan semakin besar, baik pada lingkup sektoral maupun global. Dengan demikian maka peran organisasi kesekretariatan perlu didorong bukan hanya terfokus pada fungsi administratif kesekretariatan saja melainkan juga mulai memperkuat fungsi sebagai

unit kerja *think-tank*; berperan dalam memberikan berbagai saran-pertimbangan, memberikan respon cepat (*quick analysis*), serta mengembangkan teori dan model pembangunan perikanan tangkap. Kesekretariatan juga perlu lebih membuka diri untuk mempermudah koordinasi lintas sektor.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, beberapa strategi secara spesifik diarahkan untuk: 1) Peningkatan inovasi program; 2) Intensifikasi manajemen berbasis IT; 3) Peningkatan skala kerjasama bidang perikanan tangkap baik di lingkup KKP (antar Eselon I) maupun Nasional (antar K/L, Pemda, BUMN, swasta); 4) Penerbitan peraturan terkait proses bisnis perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan; 5) Harmonisasi dan revisi regulasi terkait; dan 6) Penguatan manajemen data, dengan pendataan yang lebih menyeluruh.

K/L LAIN	PEMDA	KKP
<b>PU-PERA</b> Jalan / Rumah / Dermaga Pelabuhan / air bersih	Penyiapan lahan	Tata ruang/zonasi/masterplan
<b>KEMEN-ATR</b> Sertifikasi Tanah Nelayan	Identifikasi permasalahan di daerah	Sarana Sistem Rantai Dingin
<b>KEMENDAGRI</b> Percepatan P3D, sinergi pusat-daerah	Identifikasi / pengurusan administrasi / penyaluran bantuan	Penyuluhan, Pelatihan, Penguatan kelembagaan kelompok
<b>KEMEN-KOPERASI</b> Pembentukan / Pembinaan Koperasi	Manajemen data kenelayanan	Riset teknologi perikanan tangkap
<b>KEMHUB</b> Pengukuran GT, dokumen kapal	Partisipasi pada forum kelembagaan WPP	Pengawasan SDKP
<b>KEMENDES</b> Sinergi dana desa, desa nelayan	Sinergi pembiayaan kegiatan prioritas nasional di daerah	Sarana Pemasaran
<b>KEMENKOMAR</b> Koordinasi / sinkronisasi, peluang investasi	Menggalang dukungan pembangunan dari pihak swasta maupun pihak lainnya	<b>BUMN</b>
	Integrasi sistem perizinan	<b>Swasta</b>
	Pengembangan pelabuhan	

Gambar 3.5. Pemetaan Dukungan Stakeholder Potensial terhadap Pembangunan Perikanan Tangkap

## 2. Kebijakan Pengarusutamaan

### a. Tujuan Pembangunan berkelanjutan

Strategi pelaksanaan meliputi: 1) Penerapan konsep ekonomi hijau; 2) Penerapan konsep *eco fishing port*; 3) Alternatif penggunaan bahan bakar gas untuk kapal perikanan; 4) Inovasi teknologi API ramah lingkungan.

### b. Gender

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penguatan peran wanita nelayan dalam usaha perikanan tangkap.

### c. Modal sosial budaya

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui pengaplikasian kearifan lokal dalam kegiatan penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan.

### d. Transformasi digital

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penggunaan teknologi dalam sistem pemerintahan (*e-logbook*, *e-services* perizinan, *e-layar*, dll).

Untuk mengakselerasi pencapaian arah kebijakan tersebut, Ditjen Perikanan Tangkap telah menginisiasi beberapa kegiatan prioritas yang diharapkan dapat menjadi kunci, memberikan *multiplier effect* pada kegiatan lainnya, serta menghasilkan dampak langsung pada stakeholder. Kegiatan prioritas tersebut meliputi implementasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT), pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol, penyederhanaan regulasi perikanan tangkap, pengembangan pelabuhan perikanan unggul, pengembangan Kampung Nelayan Maju (KALAJU), serta armada perikanan yang kompetitif. Kegiatan prioritas setidaknya bersifat, namun tidak terbatas, sebagai akselerator setiap arah kebijakan serta terdapat unsur inovasi didalamnya. Kegiatan lainnya yang mengacu pada beberapa pertimbangan seperti dukungan legislatif dan berbagai kebijakan pimpinan lainnya masih dapat dikategorikan sebagai kegiatan prioritas dalam konteks pembangunan perikanan tangkap secara utuh.

Kegiatan Prioritas DJPT	Gambaran Umum
Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT)	Merupakan platform pengajuan izin usaha perikanan tangkap yang memungkinkan penerbitan izin dilakukan hanya dalam waktu 1 jam, dan keseluruhan prosesnya dilakukan secara online. Intensifikasi penggunaan serta berbagai pemutakhiran sistem perizinan masih terus akan dilakukan. Upaya reformasi perizinan ini merupakan salah satu gebrakan untuk meningkatkan pelayanan publik serta dimaksudkan

Kegiatan Prioritas DJPT	Gambaran Umum
	untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki iklim investasi perikanan tangkap
Pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol	Peluang pemanfaatan investasi tuna diprediksi dapat mencapai Rp 7 Triliun. Seiring upaya diplomasi yang terus diintensifikasi dengan pengelola perikanan regional-RFMO, upaya peningkatan investasi-industrialisasi serta peningkatan kapasitas nelayan lokal pada komoditas TCT terus diakselerasi
Penyederhanaan regulasi	Dalam rangka mewujudkan usaha penangkapan ikan yang berkeadilan serta iklim investasi yang baik, sejumlah peraturan disederhanakan dan beralih pada hukum positif. Beberapa substansi penyederhanaan utama meliputi kemudahan perizinan, pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan yang sebelumnya dilarang, kemudahan transshipment, batasan ukuran kapal yang lebih berdaya saing di ZEEI-laut lepas serta lebih melindungi nelayan kecil di perairan kepulauan
Pelabuhan Perikanan Unggul	Peningkatan peran pelabuhan perikanan sebagai 1) pusat bisnis kelautan dan perikanan terintegrasi; 2) pusat layanan dan pendataan serta ketetelusuran yang maju, andal, dan akuntabel; serta 3) <i>Eco Fishing Port</i> , yakni dalam menjaga mutu ikan dan standarisasi ramah lingkungan
Kampung Nelayan Maju	Konsep perwujudan lingkungan permukiman nelayan yang maju, bersih, sehat dan nyaman yang mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas kehidupan nelayan dan keluarganya. Salah satu strategi pengembangannya adalah melalui integrasi permukiman nelayan dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi, seperti pelabuhan perikanan dan kawasan wisata bahari-kuliner
Armada Perikanan yang Kompetitif	Untuk mewujudkan industrialisasi perikanan, diperlukan armada perikanan (kapal perikanan, alat penangkapan ikan, awak kapal perikanan), serta manajemennya yang kompetitif. Konsep yang diusung yakni pemenuhan aspek ketertelusuran ( <i>traceability</i> ), standar keamanan kapal, penanganan ikan ( <i>fish handling</i> ), serta standar keselamatan kerja

## Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020- 2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. PPN Kejawanan sebagai Unit Pelaksana

Teknis (UPT) tidak membuat kerangka regulasi karena fungsinya sebagai pelaksana regulasi sehingga regulasi yang diterapkan di PPN Kejawanan mengacu kepada kerangka regulasi KKP dan DJPT.

## **Kerangka Kelembagaan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dalam hal ini dipimpin oleh seorang kepala Pelabuhan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan menyelenggarakan fungsinya:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
13. Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
15. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan tersebut pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pemerintahan yaitu fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Serta fungsi lainnya yang terkait dengan pengelolaan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pemerintahan tersebut meliputi: Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan; Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan; Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan; Pelaksanaan kesyahbandaran; Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan; Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan; Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan; Pemantauan wilayah pesisir; Pengendalian lingkungan; Kepabeanaan; dan/atau keimigrasian.

2. Fungsi perusahaan yaitu fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan yang meliputi : Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan; Pelayanan bongkar muat ikan; Pelayanan pengolahan hasil perikanan; Pemasaran dan distribusi ikan; Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan; Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;

Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; Wisata bahari; dan/atau Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

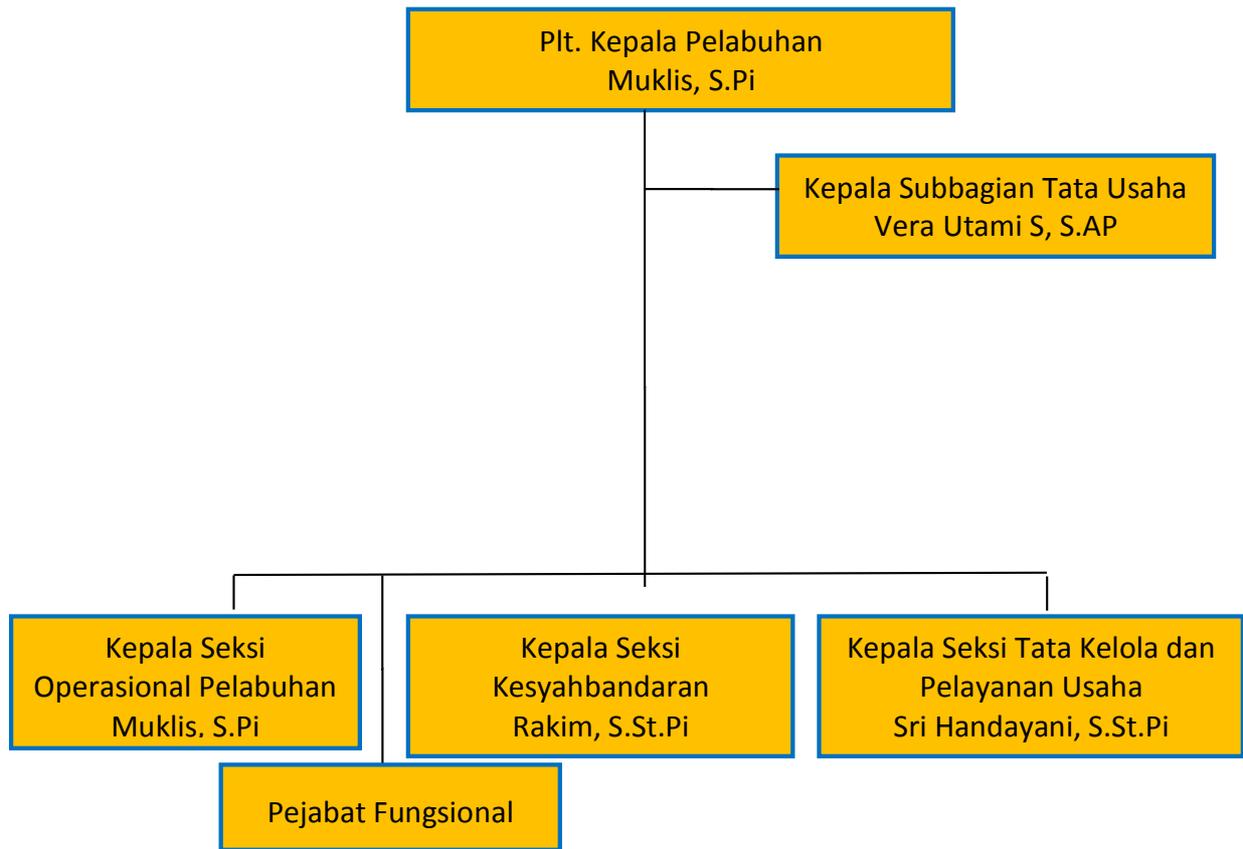
Dalam penyelenggaraan fungsi tersebut, dengan memperhatikan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab masing-masing eselon-I lingkup KKP yang berkaitan dengan kebijakan di daerah secara implisit juga menjadi tugas dan fungsi pelabuhan perikanan.

### **Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan**

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 39/PERMEN-KP/2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Sub Koordinator Operasional dipimpin oleh Kepala Seksi Operasional Pelabuhan yang memiliki tugas dan fungsinya yaitu melakukan persiapan bahan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis, dan penerbitan Sertifikat CPIB.
2. Sub Koordinator Kesyahbandaran, dipimpin oleh Kepala Seksi Kesyahbandaran mempunyai tugas dan fungsinya melakukan pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan, pemeriksaan *Log Book*, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Sub Koordinator Tata Kelola dan Pelayanan Usaha, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas dan fungsinya yaitu melakukan persiapan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; serta fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan, melakukan persiapan bahan pelaksanaan pelayanan jasa seperti sewa alat berat, sewa lahan, jasa kebersihan, pas harian/berlangganan, penerbitan rekomendasi pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha, serta bimbingan teknis pelayanan usaha.
4. Sub Koordinator Tata Usaha, yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan dan umum, pelaksanaan pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja), rumah tangga dan Barang Milik Negara, pelayanan masyarakat perikanan, melakukan persiapan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional kepelabuhanan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan Fungsional pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan terdiri dari Pranata Komputer (Muda), Statistisi (Penyelia), Analis Mutu Hasil Perikanan dan Pengawas Perikanan Ahli (Pertama).



**Gambar 3.6.** Bagan Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

# BAB 4

## INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### A. Target Kinerja

#### Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran (Output). Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai Indikator Kinerja Kegiatan berupa sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan serta cascading dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

**Tabel.** Indikator Kinerja Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2020

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	1	Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap (orang)		5	24	26	30
2	Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	2	Nilai PNBPN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. Juta)	2.260	2.445	2.766	3.462	3.563
3	Tata Kelola Sumber Daya Ikan Bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	3	Jumlah Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan Yang Telah Dikumpulkan dan Diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (laporan)	50	60	120	150	180
4	Produksi Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	4	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (ton)	3.800	3.930	4.200	4350	4.500
5	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	5	Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)		1	1	1	1
6	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang berdaya saing dan berkelanjutan	6	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)	80	81	82	83	84
7	Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	7	Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (orang)	10	15	30	45	50
8	Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	8	Persentase kapal perikanan yang berizin di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)		75	75	75	75

9	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	9	IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (indeks)	71	73	79	80	81
		10	Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)	45,07	75,07	75,07	75,07	75,07
		11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)	85,15	85,15	85,25	85,25	85,25
		12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)	-	72,50	75	75	75
		13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)	-	72,50	75	75	75
		14	Nilai kinerja anggaran lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)
		15	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)

## B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan perikanan tangkap, serta mencapai target sasaran utama yang telah ditetapkan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari APBN. Pendanaan APBN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan difokuskan untuk pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap, penguatan regulasi, penataan perizinan, pemberdayaan dan berbagai kegiatan pembangunan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat yang terkait dengan usaha perikanan tangkap. Secara terinci kerangka pendanaan yang bersumber dari APBN menurut program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 1**.

# BAB 5 PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2020 – 2024 merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, sehingga penyusunan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Renstra Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2020 - 2024 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional menjadi prioritas utama, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. Namun demikian, Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program-program Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan juga dihasilkan berkat adanya dukungan seluruh jajaran baik dari struktural, pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan serta berbagai sektor terkait lainnya, masyarakat juga termasuk seluruh stakeholders. Kerja keras dari seluruh jajaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran program dan kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang tertuang dalam Rencana Strategis ini.



# LAMPIRAN

## Lampiran 1: Kerangka Pendanaan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET					Anggaran (Rp. Juta)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>								15,32	19,15	23,93	29,91	37,37	
<b>Pengelolaan Pelabuhan Perikanan</b>													
1	Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	1	Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap (orang)		5	24	26	30					
2	Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	2	Nilai PNBP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. Juta)	2.260	2.445	2.766	3.462	3.563					
3	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	3	Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)		1	1	1	1					
4	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang berdaya saing dan berkelanjutan	4	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)	80	81	82	83	84					
<b>Pengelolaan Sumber Daya Ikan</b>								0,046	0,057	0,071	0,088	0,11	
5	Tata Kelola Sumber Daya Ikan Bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	5	Jumlah Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan Yang Telah Dikumpulkan dan Diverifikasi di Pelabuhan Perikanan	50	60	120	150	180					

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET					Anggaran (Rp. Juta)						
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
			Nusantara Kejawatanan (laporan)												
6	Produksi Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan	6	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan (ton)	3.800	3.930	4.200	4350	4.500							
<b>Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan</b>									0,044	0,055	0,068	0,085	0,106		
7	Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan	7	Persentase kapal perikanan yang berizin di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan (persen)		75	75	75	75							
<b>Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan</b>									0,096	0,12	0,15	0,187	0,225		
8	Pengelolaan awak kapal perikanan yang bedaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan	8	Persentase kapal perikanan yang berizin di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan (persen)		75	75	75	75							
<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap</b>									9,84	12,3	15,3	19,21	24,01		
9	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan	9	IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan (indeks)	71	73	79	80	81							
		10	Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan (nilai)	45,07	75,07	75,07	75,07	75,07							
		11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pelabuhan	85,15	85,15	85,25	85,25	85,25							

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET					Anggaran (Rp. Juta)					
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
			Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)											
		12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)	-	72,50	75	75	75						
		13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)	-	72,50	75	75	75						
		14	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)						
		15	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)						